

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Sutedi, 2013). Perkembangan pasar modal tidak terlepas dari peranan seluruh sektor yang bergerak diberbagai bidang pada bursa efek. Ada sepuluh sektor yang terdaftar di bursa efek yaitu, sektor pertanian; sektor pertambangan; sektor industri dasar dan kimia; sektor aneka industri; sektor industri barang konsumsi; sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan; sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi; sektor keuangan; sektor perdagangan, jasa dan investasi (www.idx.co.id). Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia adalah sektor keuangan. Sektor keuangan terdiri dari: bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan asuransi. Diantara keempat perusahaan yang bergerak di bidang sektor keuangan, bank merupakan perusahaan yang paling menunjukkan perkembangan yang pesat. Bank menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No.10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (www.bpkp.go.id).

Perkembangan perbankan di Indonesia khususnya bank umum konvensional dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Kantor Cabang Bank Konvensional di Indonesia

PERIODE	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	3.196	3.346	3.467	3.625	3.643
Februari	3.200	3.392	3.491	3.629	3.639
Maret	3.211	3.400	3.509	3.635	3.645

(Bersambung)

(Sambungan)

April	3.222	3.336	3.525	3.644	3.649
Mei	3.229	3.444	3.540	3.647	3.617
Juni	3.246	3.461	3.557	3.650	3.620
Juli	3.228	3.346	3.560	3.653	3.618
Agustus	3.235	3.392	3.570	3.651	3.622
September	3.250	3.400	3.581	3.651	3.626
Oktober	3.273	3.336	3.582	3.663	3.462
November	3.282	3.444	3.590	3.625	3.434
Desember	3.298	3.461	3.611	3.643	3.605
TOTAL	38.870	40.758	42.583	43.716	43.180

Sumber : www.ojk.go.id

Dilihat dari tabel 1.1, jumlah kantor cabang tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 mengalami kenaikan 5% hingga 6%. Walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang disebabkan adanya konsolidasi internal, tetapi angka tersebut tetap tidak mempengaruhi eksistensi perbankan di Indonesia. Konsolidasi internal dilakukan guna meningkatkan efisiensi kinerja bank (Tampubolon 2016, 19 Juli). Hal ini berdampak positif bagi para masyarakat maupun pihak dari bank. Masyarakat sendiri dapat dengan mudah mengakses pelayanan dari perbankan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyimpan ataupun melakukan peminjaman ke bank. Dengan bertambahnya jumlah perbankan maka tingkat risiko yang dihadapi tiap perbankanpun akan bertambah. Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan, maka objek yang akan digunakan oleh peneliti adalah bank umum konvensional yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Data terkait objek penelitian peneliti peroleh dari BEI, dan laporan tahunan perbankan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Kanada sumber dana eksternalnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha non-keuangan sebagian besar berasal dari pinjaman (*loans*), dan pinjaman terbesar tersebut berasal dari pinjaman bank. Bank yang paling banyak beroperasi di seluruh dunia adalah bank umum konvensional, di mana bank konvensional sebagai lembaga perantara keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari deposan (*supplier* dana) dengan menerbitkan kewajiban, dan mengalokasikannya ke pihak debitor (*demand*er dana), sehingga menjadi aset bank (Silvina, 2009). Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 ada enam jenis jasa utama yang ditawarkan oleh perbankan diantaranya: giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, surat berharga dan kredit (www.bpkp.go.id). Tugas utama dari perbankan adalah sebagai lembaga pemberi pinjaman kepada nasabah yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh Bank Sentral Indonesia dan sebagai lembaga penyimpanan dana bagi para nasabah yang memberikan kepercayaannya untuk menyimpan dana mereka pada bank tersebut.

Nasabah maupun investor tidak akan mudah percaya untuk menitipkan dana mereka kepada bank tanpa melihat dan mempertimbangkan kondisi perbankan tersebut. Salah satu indikator kepercayaan nasabah dan investor adalah kondisi bank tersebut. Apabila bank dalam kondisi sehat maka para nasabah dan investor tidak akan ragu dalam menitipkan dana mereka, tetapi apabila kondisi bank tersebut kurang sehat maka mereka akan ragu-ragu untuk menyimpan atau menitipkan dana mereka. Tata cara penilaian kesehatan bank diatur dalam surat edaran No.13/24/DPNP, Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5184), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) dan PBI No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4602), antara lain diatur bahwa Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*); dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit tingkat kesehatan bank (www.bi.go.id).

Berdasarkan profil risiko (*risk profile*) menurut peraturan otorasi jasa keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, terdapat 8(delapan) risiko yang harus dikelola bank yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (www.ojk.go.id). Seluruh kegiatan perbankan tidak terlepas dari kedelapan risiko tersebut. Oleh sebab itu, implementasi manajemen risiko merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh industri perbankan. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Pandia, 2012). Sejak krisis moneter melanda Indonesia pada 1998 yang menyebabkan beberapa bank terpaksa menghentikan kegiatannya, hal ini membuat para pelaku usaha perbankan sekarang menjadi lebih berhati-hati. Apalagi ditambah dengan terjadinya sederatan krisis global di Amerika dan Eropa sejak 2008, yang dapat memberikan dampak pada industri perbankan Indonesia. Oleh karena itu peran manajemen risiko terasa lebih penting untuk secara sungguh-sungguh dilaksanakan. Peranan implementasi manajemen risiko selain sejalan dengan ketentuan regulator, juga memberikan dampak positif bagi internal bank yang

bersangkutan untuk menjaga agar bank senantiasa mempunyai daya tahan pada berbagai situasi (Ikatan bankir Indonesia, 2015).

Manajemen risiko merupakan salah satu indikator yang digunakan para investor, debitor, dan pengguna informasi lainnya dalam mengetahui kondisi suatu perbankan dan masalah apa yang sedang dihadapi oleh bank tersebut. Setiap pengguna informasi selalu mengharapkan informasi yang disajikan oleh perbankan bersifat transparansi. Bacelius Ruru dalam Sutedi (2013), Transparansi atau pengungkapan (*disclosure*) adalah kewajiban perusahaan atau emitmen untuk menyampaikan laporan perusahaan, baik dalam bentuk laporan keuangan berkala maupun laporan kejadian penting lainnya. Informasi tersebut harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pengungkapan yang diterapkan didalam laporan tahunan, maka seluruh informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan oleh para investor, debitor, dan pengguna informasi lainnya. Salah satu pengungkapan yang sangat diinginkan oleh para investor, debitor, dan pengguna informasi lainnya adalah manajemen risiko. Amran *et al.*, dalam Kristiono *et al.*, (2014) menyatakan pengungkapan manajemen risiko sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang. Zulfahridar dan Al Azhar (2014) melakukan Pengukuran ke 8(delapan) risiko perbankan menggunakan rumus RMD(*Risk Management Disclosure*). RMD menggunakan perhitungan jumlah pengungkapan risiko dibagi dengan total jenis risiko, dengan perhitungan apabila perusahaan tersebut melakukan pengungkapan risiko didalam laporannya maka akan diberi nilai 1(satu), dan jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan risiko maka akan diberi nilai 0(nol). Tabel 1.2, berikut menyajikan tentang pengungkapan manajemen risiko pada perbankan yang terdaftar pada BEI periode 2011-2015.

Tabel 1.2
Pengungkapan Manajemen Risiko Perbankan yang Terdaftar pada BEI
Periode 2011-2015

Kode Saham	2011	2012	2013	2014	2015	Kode Saham	2011	2012	2013	2014	2015
AGRO	1	1	1	1	1	BNBA	1	1	1	1	1
BABP	1	1	1	1	1	BNGA	1	1	1	1	1
BACA	1	1	1	1	1	BNII	1	1	1	1	1
BBCA	1	1	1	1	1	BNLI	0,75	1	1	1	1
BBKP	1	1	1	1	1	BSIM	1	1	1	1	1
BBNI	1	1	1	1	1	BSWD	1	1	1	1	1
BBNP	1	1	1	1	1	BTPN	1	1	1	1	1
BBRI	1	1	1	1	1	BVIC	1	1	1	1	1
BBTN	1	1	1	1	1	INPC	0,37	0,5	0,5	0,5	0,5
BCIC	1	1	1	1	1	MAYA	1	1	1	1	1
BDMN	1	1	1	1	1	MCOR	1	1	1	1	1
BEKS	1	1	1	1	1	MEGA	1	1	1	1	1
BJBR	1	1	1	1	1	NISP	1	1	1	1	1
BKSW	1	1	1	1	1	PNBN	1	1	1	1	1
BMRI	1	1	1	1	1	SDRA	1	1	1	1	1

Sumber: Laporan Tahunan bank yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 (data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa diantara ketigapuluh bank hanya dua yang pengungkapan manajemen risikonya kurang dari 100%, contohnya untuk Bank Pertama dengan kode saham BNLI pada periode 2011 memiliki angka yang kurang dari satu. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 bank itu hanya mengungkapkan risikonya enam dari jumlah risiko perbankan yang ada yaitu delapan. Untuk Bank Artha Graha Internasional dengan kode saham INPC pada periode 2011, hanya mengungkapkan tiga dari delapan risiko yang ada. Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2015 INPC hanya mengungkapkan empat dari delapan risiko yang ada. Hal ini disebabkan karena Bank Pertama dan Bank Artha Graha Internasional merupakan perbankan yang tergolong dalam bank kelompok buku 3 dan 2 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan bank-bank yang berada pada kelompok buku 4 seperti mandiri dan BCA (www.kinerjabank.com) karena dari segi operasional dan ukurannya pun berbeda, sehingga kebutuhan dalam pengelolaan manajemen risikonya pun berbeda.

Sedangkan praktik pengungkapan manajemen risiko merupakan fenomena yang wajib diterapkan disemua perusahaan khususnya pada perbankan

tanpa melihat dari kondisi perbankan tersebut. Hal ini didukung dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Berdasarkan penelitian terdahulu terhadap praktik pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan oleh, Kristiono *et al.*, (2014), Bangkit dan Luciana (2013), Anindyarta dan Cahyonowati (2013), Candra dan Bambang (2014), serta Rashidah.dkk (2013), diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko, yaitu: kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen.

Manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam membentuk *good corporate governance*, dimana mekanisme pengawasan dari *corporate governance* yang terdiri dari struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik (Hasporo dalam Bangkit dan Luciana, 2013) dan ukuran perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan manajemen risiko perusahaan. Hal ini karena kepemilikan institusional membutuhkan lebih banyak informasi perusahaan agar mereka dapat membuat keputusan tentang portofolio investasi mereka (Solomon dalam Amalia dan Anis, 2013). Tabel 1.3 berikut menyajikan kepemilikan institusional pada bank umum konvensional pada BEI periode 2011-2015.

Tabel 1.3
Kepemilikan Saham Institusional pada Perbankan yang Terdaftar di BEI
Periode 2011-2015 (dalam persen)

Periode	Rata-Rata RMD	Periode	Rata-Rata Kepemilikan saham
2011	97	2011	76,79
2012	98	2012	75,18
2013	98	2013	74,25
2014	98	2014	74,15
2015	98	2015	74,85

Sumber: Laporan Tahunan bank yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 (data yang telah diolah)

Tabel 1.3, menunjukkan kepemilikan institusional bank umum konvensional yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa total kepemilikan saham institusional dari tahun 2012 hingga 2014 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,006%. Angka ini tidak sejalan dengan pengungkapan manajemen risiko, karena angka kepemilikan saham institusional tahun 2011 merupakan jumlah yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya, sedangkan pada angka pengungkapan manajemen risiko tahun 2011 menunjukkan jumlah angka yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun lainnya.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan manajemen risiko dilakukan oleh, Bangkit dan Luciana (2013), Amalia dan Anis (2013), serta Kristiono *et al.*, (2014). Hasil dari penelitian Bangkit dan Luciana (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara parsial mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Hal ini didukung dengan penelitian Amalia dan Anis (2013) yang, menyatakan bahwa secara parsial kepemilikan institusional mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kristiono *et al.*, (2014) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Bukan hanya kepemilikan institusional, ukuran perusahaanpun turut mempengaruhi tingkat pengungkapan manajemen risiko. (Sudarmardji dan Sularto dalam Bangkit dan Luciana, 2013) menyatakan ukuran perusahaan dapat diartikan besar kecilnya sumber daya manusia yang dimilikinya. Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjual, dan kapitalisasi pasar. Peneliti menggunakan total aktiva sebagai metode untuk menilai ukuran perusahaan karena Aset merupakan harta perusahaan dimana Pandia (2012) menyatakan aset bagian dari *asset and liability management committee* (ALCO). ALCO adalah fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh bank dalam rangka mengoptimalkan susunan neraca sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal dalam batas-batas risiko yang terkendali. Tabel 1.4, berikut menyajikan

total aktiva pada bank umum konvensional yang terdaftar pada BEI periode 2011-2015.

Tabel 1.4
Total Aset Perbankan yang Terdaftar pada BEI Periode 2011-2015

Periode	Rata-Rata RMD	Periode	Rata-Rata Total Aset
2011	97	2011	Rp 78.749.143,93
2012	98	2012	Rp 117.489.095,03
2013	98	2013	Rp 126.408.463,67
2014	98	2014	Rp 136.574.417,80
2015	98	2015	Rp 147.606.478,33

Sumber: Laporan Tahunan bank yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 (data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat rata-rata total aset perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Pada tahun 2011 hingga 2012 total aset dari perbankan mengalami kenaikan hingga 67%, walaupun dari tahun 2012 hingga 2015 kenaikan total asetnya tidak terlalu signifikan tetapi ini dapat membuktikan bahwa kondisi perbankan di Indonesia apabila dilihat dari total asetnya sangatlah baik. Hal ini sejalan dengan angka pengungkapan manajemen risiko pada tahun 2011 hingga 2012 mengalami peningkatan dan dari tahun 2012 hingga 2015 memiliki tingkat pengungkapan yang konstan.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko telah dilakukan sebelumnya oleh Anindyarta dan Cahyonowati (2013), Kristiono *et al.*, (2014), Rashidah,dkk (2013), Bangkit dan Luciana (2013), serta Candra dan Bambang (2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anindyarta dan Cahyonowati (2013) pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, hal ini didukung oleh penelitian Zubahridar dan Azhar (2014) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Rashidah,dkk (2013) pada bank islam regional MENA(*Middle East and North African*) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bangkit dan Luciana (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan manajemen perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Bambang (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan juga tidak mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Terlepas dari pengaruh eksternal dan ukuran perusahaan, pihak internal perusahaanpun memiliki pengaruh dalam manajemen perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memantau kondisi perusahaan dari segi operasioanal maupun dari segi manajemen risiko, dimana mereka harus memastikan bahwa manajemen risiko yang berada dalam perusahaan dapat diungkapkan dengan sebenar-benarnya kepada pengguna informasi. Raber dalam Amalia dan Anis, (2013) menyarankan bahwa dengan dewan komisaris yang efektif harus melaksanakan peran mereka dalam memastikan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dalam keputusan monitoring serta manajemen risiko. Semakin banyak jumlah proporsi dewan komisaris independen diharapkan dapat memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak pula. Tingkat pengungkapan yang lebih tinggi diharapkan perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi (Lopes dan Rodrigues dalam Oliviera, *et.al.* dalam Anindyarta dan Cahyonowati, 2013)

Tabel 1.5, berikut akan menunjukkan total dewan komisaris independen yang terdapat pada perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

Tabel 1.5
Jumlah Dewan Komisaris Independen pada Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2011-2015 (dalam persen)

Periode	Rata-Rata RMD	Periode	Rata-Rata Total Dewan Komisaris
2011	97	2011	57
2012	98	2012	60
2013	98	2013	56
2014	98	2014	55
2015	98	2015	56

Sumber: Laporan Tahunan bank yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 (data yang telah diolah)

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa peran dewan komisaris independen pada perbankan yang terdaftar pada BEI periode 2011-2015. Jumlah dewan komisaris independen didalam perbankan dari tahun 2011 hingga 2015 memiliki angka yang tidak konstan, dimana tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah tingkat pengungkapan manajemen risiko yang dari tahun 2011 hingga 2012 mengalami kenaikan dan pada tahun 2012 hingga 2015 tingkat pengungkapan manajemen risikonya konstan.

Penelitian yang berkaitan dengan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan manajemen risiko telah dilakukan oleh Anindyarta dan Cahyonowati (2013) , serta Amalia dan Anis (2013). Penelitian yang dilakukan Anindyarta dan Cahyonowati (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Anis (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan dan paparkan di atas, serta adanya ketidak konsistenan penelitian terdahulu terhadap penelitian mengenai pengungkapan manajemen risiko, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengungkapan manajemen risiko, dengan

judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko”

1.3 Perumusan Masalah

Bank umum konvensional merupakan bank yang paling banyak ditemui di Indonesia. Peranan bank umum konvensional didalam kehidupan masyarakat sangatlah penting karena bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana. Saat ini banyak perusahaan yang pendanaannya berasal dari pinjaman bank serta banyak pula investor yang percaya dalam melakukan investasi di perbankan, sehingga para nasabah, deposan, investor, dan pengguna informasi lainnya sangat berharap bahwa informasi yang disajikan oleh perbankan bersifat transparan untuk mendukung para pengguna informasi dalam mengambil keputusan.

Salah satu faktor informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi adalah mengenai pengungkapan manajemen risiko. Karena saat ini kondisi perusahaan tidak lepas dari risiko. Dengan adanya pengungkapan risiko, para pihak pengguna informasi dapat mengetahui kondisi perusahaan dan apakah risiko tersebut dapat mempengaruhi dana yang mereka investasikan.

1.4 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015 ?
2. Apakah kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko secara simultan pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015 ?

3. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015 ?
4. Apakah Ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015 ?
5. Apakah dewan komisaris independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
2. Mengetahui apakah kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko secara simultan pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
3. Mengetahui apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015.
4. Mengetahui apakah Ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015.
5. Mengetahui apakah dewan komisaris independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015.

1.6 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik dari segi aspek teoritis maupun dari segi aspek praktis. Terutama untuk pihak investor, manajemen bank, dan nasabah. Secara terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam bidang ilmu perbankan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis terkait perbankan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Manajemen Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pihak manajemen perbankan dalam perbaikan dan pembenahan mengenai praktik dan pengaplikasian manajemen risiko di dalam organisasi(perbankan).

2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di perbankan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel dan Subvariabel

Variabel yang digunakan adalah kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko sebagai variabel dependen.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia sehingga lokasi penelitian adalah di Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko pada sektor perbankan.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2016 dan akan berakhir pada bulan Desember 2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum mengenai obyek studi penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas mengenai hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Bab ini meliputi uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan pengolahan data beserta pembahasannya, yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan lingkup penelitian serta konsisten dengan tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran maupun rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan dan pihak lain yang membutuhkan.